



TELAAH KEBIJAKAN SEGREGASI GENDER DI PESANTREN TERHADAP RAGAM ORIENTASI SEKSUAL SANTRI

THORIQ AZIZ JAYANA¹, ULFATUL HASNA²

¹azizjthoriq@yahoo.com, ²asrinanurdiana@gmail.com

¹SDN Ponjanan Timur 2, Pamekasan

²Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura

Received: April 25th, 2021

Accepted: November 28th, 2021

Published: December 30th, 2021

Abstract: Study of Gender Segregation Policy in Islamic Boarding Schools Towards the Variety of Santri's Sexual Orientation

This study to analyze the gender segregation policy in Islamic boarding schools that have an impact on the development of the sexual orientation of students. The segregation is based on Islamic law, but does not pay attention to aspects of sexual orientation, resulting in the emergence of various sexual orientations which are actually considered abnormal and immoral (in the concept of religion and social construction). This research was conducted at the Fathul 'Ilmi Islamic Boarding School, Madura. The research method uses a qualitative approach with the type of phenomenological research. Data collection techniques using in-depth interviews and observation. While the data processing and analysis techniques used triangulation from the results of interviews and observations. Selection of informants based on purposive sampling. The results showed that: 1) at the Fathul 'Ilmi Islamic Boarding School there is strict gender segregation, 2) there are various sexual orientations of students, namely heterosexual, homosexual, and bisexual. 3) the solution to the problem of student sexual orientation, namely pesantren, needs to make policies that are gender responsive.

Keyword: gender segregation, sexual orientation, gender responsive

Abstract: Telaah Kebijakan Segregasi Gender di Pesantren Terhadap Ragam Orientasi Seksual Santri

Penelitian ini berupaya menganalisis tentang kebijakan segregasi gender di pesantren yang berdampak pada perkembangan orientasi seksual santri. Segregasi tersebut didasarkan pada hukum Islam, namun tidak memperhatikan aspek orientasi seksual, sehingga akibatnya memunculkan beragam orientasi seksual yang justru dinilai abnormal dan amoral (dalam konsep agama dan konstruksi sosial). Penelitian ini dilakukan di Pesantren Fathul 'Ilmi, Madura. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan teknik pengolahan data dan analisis menggunakan triangulasi dari hasil wawancara dan observasi. Pemilihan informan berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) di Pesantren Fathul 'Ilmi melakukan segregasi gender yang ketat, 2) terdapat beragam orientasi seksual santri yakni heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. 3) solusi atas permasalahan orientasi seksual santri yakni pesantren perlu membuat kebijakan yang responsif gender.

Kata Kunci: segregasi gender, orientasi seksual, responsif gender.

To cite this article:

Jayana, T.A. & Hasna, U.(2021). Telaah Kebijakan Segregasi Gender di Pesantren Terhadap Ragam Orientasi Seksual Santri. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 20(2), 192-202. <http://dx.doi:10.29300/atmipi.v20.i2.6690>.

A. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren (atau pondok) bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman namun juga menerapkan nilai-nilai islami dalam aktivitas kesehariannya (Azra 1999). Salah satu terapan nilai tersebut yakni membuat kebijakan segregasi gender yakni dengan memisahkan pengasramaan dan membatasi secara ketat interaksi sosial antara santri laki-laki dan santri perempuan. Kebijakan tersebut nampaknya sudah menjadi sistem 'baku' dalam tatanan sosial yang di semua pesantren (Sudrajat Nur, Priyatna, dan Zakaria 2016).

Pemberlakuan segregasi gender tentunya merupakan implementasi dari nilai-nilai ortodoksi keislaman, yakni agar tidak bercampurbaur lain jenis yang bukan muhrim. Bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan ber-*ikhtilat* (bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*) sebab bisa menimbulkan kemaksiatan (al-Bajuri 1999). Di samping itu untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas di kalangan santri serta untuk menjaga wibawa pesantren sebagai penegak kultur keislaman (Solichin 2013). Berdasarkan alasan itulah, menurut Dzulkarnain, para pemegang kebijakan pesantren menciptakan tatanan sosialnya dengan pertimbangan utama ialah sebagai bentuk pengejawantahan terhadap norma keagamaan (Dzulkarnain 2012).

Dalam membuat kebijakan, nampaknya pihak otoritas pesantren kurang mempertimbangkan aspek perkembangan orientasi seksual santri. Sebab pembuat kebijakan, dalam hal ini kiai atau pengasuh, lebih memfokuskan pada pertimbangan aspek keagamaan (untuk menghindari kemaksiatan dan pergaulan bebas dengan lawan jenis). Padahal aspek perkembangan orientasi seksual sejatinya menjadi hierarkisitas yang mesti dipenuhi sebagai kebutuhan yang paling dasar bagi setiap orang (Goble 1971). Sehingga, bila hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perkembangan orientasi seksual seseorang.

Istilah 'penyimpangan' orientasi seksual di sini dimaksudkan untuk menyebut orientasi seksual yang abnormal dan amoral (bertentangan dengan ortodoksi dalam agama). Banyak sekali jenis 'penyimpangan' orientasi seksual, diantaranya homoseksual, sadisme seksual, pedofilia, transgender, transeksual, dan sebagainya. Bahwa ragam orientasi seksual tersebut terjadi bukan karena takdir (*given*), melainkan sebuah pilihan (*choice*) dan bentukan (*construction*) (Rivai 2018).

Demikian pula dengan kebijakan pemisahan asrama di pesantren, yang tidak bisa dipungkiri, dengan pemberlakuan segregasi gender secara sangat ketat, akan menciptakan interaksi yang intensif dengan sesama jenis. Sehingga dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan orientasi seksual, misalnya yang dikenal dengan homoseksualitas (*homosexuality*). Realitasnya, sebagaimana dalam berbagai penelitian sudah banyak yang memaparkan, bahwa banyak perilaku homoseksual di kalangan santri di pesantren ((Dzulkarnain 2006; Sudrajat Nur, Priyatna, dan Zakaria 2016). Namun dalam penelitian-penelitian tersebut tidak secara spesifik membicarakan tentang kebijakan segregasi gender dan bagaimana pengaruhnya terhadap orientasi seksual, hanya lebih menyorot terhadap bentuk perilaku dan relasi ketarikatan emosi para 'pelaku' homoseksual di kalangan santri.

Realitas di atas menjadi bukti bahwa di pesantren sekali pun memiliki ragam orientasi seksual, bukan hanya heteroseksual. Dan tidak menutup kemungkinan akan muncul pula

orientasi seksual 'menyimpang' lainnya. Akan tetapi ragam orientasi seksual di kalangan santri tersebut keberadaannya secara tersembunyi (*underground*), dan terkesan ditutup-tutupi oleh pihak pengambil kebijakan dan di kalangan pesantren sendiri. Sebab membicarakan orientasi seksual santri yang 'menyimpang' masih dianggap sebagai sebuah ketabuan dan bisa menurunkan wibawa pesantren. Pengambil kebijakan pesantren perlu merekonstruksi ulang terhadap segregasi gender yang ketat, dan mengupayakan hal-hal positif untuk mengurangi perilaku-perilaku yang 'menyimpang' tersebut.

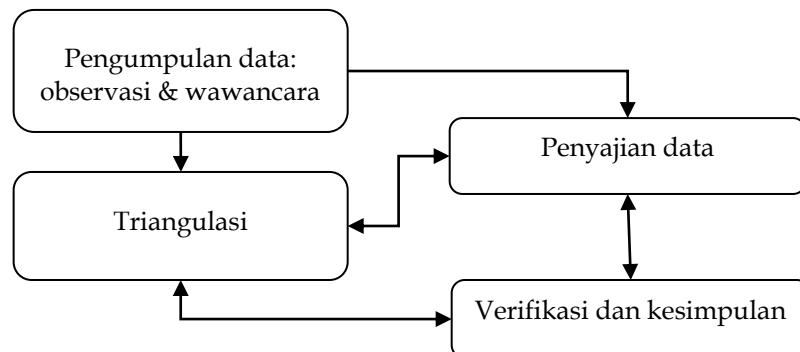
Adapun penelitian ini dilakukan di salah satu pesantren Madura, yakni Pesantren Fathul 'Ilmi yang bercorak tradisional (*salaf*). Pemilihan pesantren tersebut karena pertimbangan banyaknya santri, termasuk kategori pondok besar, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan data yang lebih beragam. Di samping itu, karena pesantren tersebut sangat terbuka untuk kegiatan penelitian sebagai bahan refleksi bagi perbaikan pesantren tersebut untuk masa berikutnya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pemilihan etno-fenomenologi bertujuan untuk mengetahui proses yang berlangsung dari kebijakan segregasi gender yang kemudian menghasilkan interaksi sosial yang intensif (ketat) sehingga memunculkan ragam orientasi seksual. Teknik pengambilan data menggunakan cara observasi dan wawancara. Sementara itu, pengambilan data dengan melakukan wawancara kepada pihak otoritas pesantren (pengasuh) dalam hal kebijakan segregasi gender, dan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada santri yang berjumlah 8 orang.

Pemilihan responden wawancara berdasarkan *purposive sampling* dengan menentukan siapa saja yang akan dipilih sebagai responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria santri yang dijadikan responden dalam hal ini ialah santri remaja yang berusia 12-22 tahun. Sebab pada rentang usia tersebut masih dalam masa pubertas dan masih dalam perkembangan orientasi seksual. Kemudian, untuk analisa data menggunakan teknik triangulasi untuk mengetahui keakuratan dan ketepatan data-data yang didapatkan. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara data hasil wawancara dengan observasi di lapangan.

Berikut skema dasar penelitian di atas.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan awal, yakni: 1) di Pesantren Fathul 'Ilmi memberlakukan segregasi gender secara ketat, bukan hanya dalam pemondokan namun juga dalam pembelajaran dan interaksi sosial. 2) memungkinkan adanya ragam

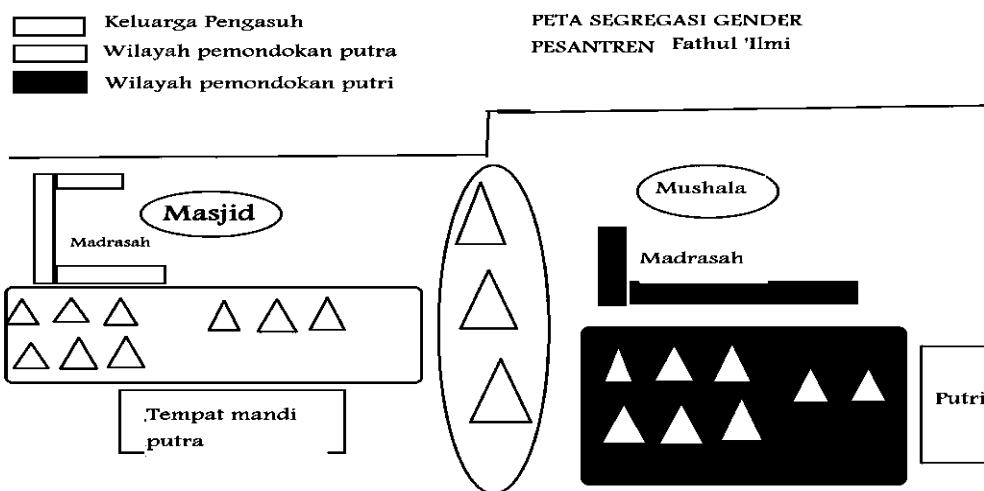
orientasi seksual di kalangan santri, karena beberapa santri putra yang berperilaku feminim atau melambai (atau disebut *take kalake'* dalam Bahasa Madura). Hasil/temuan ini merupakan temuan awal hasil observasi yang akan dibahas dan dikembangkan pada pembahasan berikut.

Pembahasan

Segregasi Gender di Pesantren Fathul 'Ilmi

Di Pesantren Fathul 'Ilmi menerapkan sistem segregasi gender secara ketat, atau segregasi gender penuh. Tipe segregasi ini memisahkan seluruh kegiatan, baik formal (madrasah), non-formal (asrama), dan informal (fasilitas) (Sudrajat Nur, Priyatna, dan Zakaria 2016). Corak lain dari tipe ini adalah memberikan batas zona yang ketat dan jangkauan jauh antara wilayah santri putri dan putra. Hal tersebut, sebagaimana dijelaskan di awal, ialah sebagai implementasi nilai-nilai keagamaan yang melarang bercampur aduknya laki-laki dan wanita.

Demikian pula realitas yang ada di Pesantren Fathul 'Ilmi, pemisahan pemondokan santri putra dan santri putri terlihat sangat tegas. Wilayah dan zona pemondokan, tempat belajar, tempat ibadah, dan segala fasilitas bagi santri putri di bagian utara, dengan pagar pembatas yang besar. Di sebelah selatan merupakan wilayah pemondokan dan segala aktifitas bagi santri putra. Sementara bagian yang menengah di antara kedua zona tersebut merupakan wilayah bagi keluarga pengasuh, yang tidak satu pun bagi santri untuk sembarangan melewati dan memasuki wilayah tersebut (Observasi, 29 Agustus 2021). Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut:



Gambar 1: peta segregasi gender di pesantren Fathul 'Ilmi

Pemberlakuan tersebut, menurut kiai pengasuh, sebagai upaya mengikuti ajaran Islam, untuk pembentukan budi pekerti (*akhlik*) yang baik, menghindari kemudaratan, serta untuk memudahkan pembelajaran.

"Pemisahan pemondokan, madrasah, tempat ibadah, dan lain-lain itu sesuai dengan syariat agama agar tidak ber-*ikhtilat* (campur aduk laki-laki dan wanita). Di samping itu agar para pengurus bisa dengan mudah mengawasi kegiatan santri, ke mana dan sedang apa santri beraktifitas akan mudah dipantau oleh pengurus. Dari situ lah penataan perilaku dan akhlak di bentuk. Jadi santri tidak ada celah untuk berbuat melanggar aturan dan ajaran agama. Lagi pula, kalau pemisahan itu tidak diterapkan, jelas akan banyak mudarat yang timbul, santri berpacaran, dan sebagainya. Jangankan disatukan, dipisah saja masih ada kasus santri berpacaran." (Wawancara dengan Kiai Pengasuh, 29 Agustus 2021).

Di Pesantren Fathul 'Ilmi, bagian sektoral santri putra, terdapat 9 asrama, setiap asrama terdiri dari rata-rata 26 kamar, di setiap kamar (dengan ukuran 3x4 meter) dihuni oleh rata-rata 10 orang. Kondisi tersebut tentu tidak memadai untuk bisa menampung sepuluh orang santri, sehingga tidak semua santri bisa tidur di dalam kamar, yang membuat sebagian diantara mereka tidur di emperan asrama atau di masjid. Di dalam kamar hanya bisa ditempati 6-7 santri dengan tidur berdempetan (Observasi 30 Agustus 2021).

Di setiap asrama diawasi oleh sekitar 5 pengurus (ustadz). Tugas ustadz inilah yang memantau kegiatan dan membimbing santri santri untuk belajar, beribadah, menjaga kebersihan, kerja bakti, hingga mengingatkan santri untuk beristirahat. Sekali dalam sebulan, ustadz mengadakan operasi dadakan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik santri, misalnya pacaran (saling berkirim surat), dan sebagainya.

"Setidaknya dalam sebulan para ustadz mengadakan sidak ke kamar-kamar santri takutnya ada yang pacaran, bawa HP, dan senjata berbahaya."

(Wawancara dengan AF, 31 Agustus 2021).

Fasilitas untuk kegiatan sehari-hari di Fathul 'Ilmi juga dilakukan segregasi. Mulai dari madrasah, tempat ibadah, sarana olah raga, dapur, dan tempat pemandian. Semua kegiatan pembelajaran dan interaksi sosial santri tersegregasi secara ketat. Kecuali dalam tingkat universitas yang dijalani oleh santri dewasa tidak begitu diperketat namun tetap diawasi. Uniknya lagi, tempat mandi di pesantren Fathul 'Ilmi (baik putra maupun putri) berbentuk kolam besar (bukan kamar mandi). Di kolam tersebut santri mandi dan mencuci pakaian. Bagi santri putra, mandi dengan memakai celana pendek, atau sarung, atau bahkan kebanyakan memilih telanjang agar lebih praktis (Observasi, 30 Agustus, 2021).

Sejatinya, penerapan segregasi gender ini memang mendukung terhadap pengawasan pendidikan, namun sistem tersebut disinyalir dapat menciptakan interaksi yang kaku terhadap lawan jenis. Bahkan segregasi dalam pendidikan akan membatasi akses, partisipasi, kontrol, dan kemanfaatan pendidikan sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam pendidikan (Muafiah 2018). Misalnya, dalam kegiatan tertentu, seperti intra sekolah, lebih didominasi oleh laki-laki ketimbang wanita (Thoriquttyas 2018).

Hal tersebut, menurut Damayanti dan Rismantingtyas, menjadi problematika yang harus diatasi dalam dunia pendidikan pesantren, sebab model tersebut mampu melanggengkan bias gender dan menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan lebih kaku. Pesantren hendaknya menciptakan model yang responsif gender, terutama dalam pendidikan, untuk menggandeng partisipasi santri putra maupun putri agar saling berkolaborasi (*collaborative learning*) (Damayanti dan Rismantingtyas 2021). Penerapan *single sex education* memang sudah menjadi ciri khas lembaga keagamaan, namun model tersebut bukan satu-satunya, dalam hal ini pesantren bisa lebih membuka diri terhadap model-model lain seperti Mix-Education (Rohmah 2017).

Ragam Orientasi Seksual Santri Fathul 'Ilmi

Bawa terdapat beberapa macam orientasi seksual di kalangan santri Fathul 'Ilmi yakni heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Dari 8 santri yang diwawancara, ada 4 santri berorientasi heteroseksual, 3 santri berorientasi homoseksual, dan 1 santri sebagai biseksual. Santri yang heteroseksual mengaku bahwa mereka masih menyukai wanita dan tidak pernah tertarik pada lelaki, meski demikian mereka mengakui bahwa terjadi 'penyimpangan' seksual di kalangan mereka. Sementara itu 3 orang santri berorientasi homoseksual, dimana mereka menyukai dan pernah mengalami hubungan *laq-dalaq*. Dan 1 orang mengaku sebagai biseksual, artinya selain suka terhadap sesama jenis, ia juga masih suka dengan wanita.

Orientasi seksual 'menyimpang' di kalangan santri Fathul 'Ilmi nampaknya perlu dieksplorasi lebih dalam. Sebab, menjadi sesuatu yang absurd bila di lembaga pendidikan

yang sangat kental dengan keagamaan malah terdapat realitas yang sumbang (*discordant*). Penyebutan ‘menyimpang’ dimaksudkan kepada bentuk amoral dan abnormal dalam perspektif keagaman dan konstruksi masyarakat (Ayub 2017), yang mana orientasi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tabu, aib, dan dilarang (Dzulkarnain 2009).

Penuturan santri AR: “Ada istilah khusus untuk menyebut homoseksual di pesantren ini yang disebut *laq-dalaq*. Kalau pelaku *laq-dalaq* itu disebut *moyer*, sedangkan yang menjadi korbannya disebut *sahel*. Anak-anak *sahel* itu memiliki paras tampan, putih bersih, dan masih lugu. Kalau satri *moyer* itu sudah senior, santri remaja. Biasanya santri itu sudah sangat dekat, sudah seperti adik-kakak, makan berdua, mandi berdua, bercandanya sudah diluar kewajaran, dan seterusnya. Keduanya saling membutuhkan, anak *sahel* butuh santri senior untuk melindunginya atau mendampinginya, sedangkan santri *moyer* butuh santri *sahel* untuk memuaskan hasrat seksualitasnya (Wawancara dengan AR, 1 September 2021).

Ketika peneliti bertanya, “Bagaimana santri *sahel* dan *moyer* bisa bertemu dan menjalin kasih-sayang?”

Menurut penuturan santri AD, “Awalnya mereka tidak saling mengenal, tapi karena keduanya sering ketemu atau kenal di kelas, atau di asrama, atau di mana saja, sampai akhirnya mereka berdua timbulah rasa nyaman satu sama lain. Ketika sudah ada rasa nyaman, akhirnya mereka lebih sering bertemu dan berduaan. Bukan hanya di pesantren, bahkan ketika liburan sekali pun mereka bisa saling mengunjungi. Keduanya saling berbagi, yang senior memberikan perlindungan kepada juniornya, dan si junior memberikan sikap manja kepada seniornya—yang justru sikap manja itu disukai oleh senior atau santri *moyer*. (Wawancara dengan AD, 2 September, 2021).

Di lain kesempatan, peneliti bertanya kepada santri KH, “Seperti apa perilaku *laq-dalaq* yang pernah Anda temukan dan alami?”

Menurut pengakuan KH, “Biasanya pada malam hari, setelah selesai kelas malam, santri itu pergi ke Astah (makam keluarga pengasuh-ed) untuk ziarah, hingga tengah malam. Nah, aslinya mereka sudah janjian untuk tidur di Astah. Atau mereka tidur bersama di asrama. Perilakunya, ya, seperti tidur *kelonan*, berpelukan, mengelus-elus paha, berciuman, hingga gesek-gesek alat kelamin ke paha pasangannya. Hal itu sudah biasa di kalangan santri, tapi kalau sampai ketahuan pengurus, maka akan diberi hukuman berat.” (Wawancara santri KH, 2 September 2021).

Ketika ditanya tentang hal “Menurut kamu, mengapa hal itu bisa terjadi?”.

Jawaban santri KH, “Ya mau bagaimana lagi, interaksi saya kan hanya dengan sesama jenis, untuk bertemu dengan santri putri kan sulitnya luar biasa. Hanya ustaz yang bisa masuk ke pemondokan santri putri, itu pun hanya untuk mengajar. Tapi ada manfaatnya juga kita bisa dipisah dengan santri putri, dosanya tidak terlalu besar. Saya kan juga manusia yang memiliki hasrat seksual, juga punya naluri ketertarikan pada seseorang. Ya sudah, salurkan saja pada santri-santri *sahel*. Kalau *laq-dalaq* itu kayaknya bukan perilaku *liwath* karena tidak dimasukkan ke dalam anus, hanya gesek-gesek ke paha orang lain.”

Kemudian peneliti bertanya kepada santri DZ dengan pertanyaan yang sama dengan di atas.

Menurut DZ, "Karena santri putri dan putra di pisah dan diawasi secara ketat. Jangankan dalam pemondokan, dalam pembelajaran dan ngaji saja dipisah. Coba interaksi kita bisa dilonggarkan dengan santri putri, mungkin tidak terjadi perilaku *laq-dalaq*, tapi pastinya akan banyak santri yang pacaran. Nah, itu lebih berbahaya lagi kalau sampai ketahuan pengurus." (Wawancara santri DZ, 3 September 2021).

Selanjutnya peneliti bertanya, "Bagaimana seandainya *moyer*-nya kamu berhenti mondok, lalu kamu bersama siapa?"

Jawab DZ, "Saya mudah mencari teman, mencari *moyer* dan *sahel* itu gampang. Di sini itu, ya tidak ada habisnya. Yang awalnya korban, nanti akan menjadi pelaku, begitu seterusnya. Di taman (tempat mandi santri-ed) tinggal kita lihat mana santri yang cakep, lalu dekati. Saya lebih suka pada santri yang anak-anak, baru masuk pesantren, kulitnya bersih, imut, dan lugu."

Dalam pantauan peneliti, selain homoseksualitas, ada orientasi seksual 'menyimpang' lainnya di pesantren Fathul 'Ilmi yakni biseksual. Sebagaimana pengakuan santri DZ, ia mengakui bahwa ada santri yang biseksual bahwa dengan inisial R, bahwa si R pernah ketahuan melakukan *laq-dalaq* sehingga dia pernah digundul rambutnya, sementara itu si R juga pernah ketahuan berpacaran dengan santri putri. Sehingga R dicap sebagai santri yang melanggar aturan berat." (Observasi, 30 Agustus 2021).

Akhirnya peneliti mewawancarai R, dalam pengakuannya, dia mengungkapkan, "Benar, saya dulu pernah dihukum karena *laq-dalaq* pada santri *sahel*. Dan saya juga pernah ketahuan pacaran dengan santri putri. saya tertarik pada santri putri karena memang saya lelaki, tapi saya juga tertarik melakukan *laq-dalaq* pada lelaki, ya mungkin karena setiap hari berinteraksi dengan lelaki, mandi bareng, tidur bareng, dan sebagainya. Itu yang saya membuat saya tertarik pada *sahel*-nya saya." (Wawancara santri R, 5 September 2021).

Dari berbagai temuan tersebut dapat dijelaskan bahwa orientasi seksual yang menyimpang bisa saja terjadi akibat dari pemberlakuan segregasi gender yang ketat. Seperti orientasi homoseksual, hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah dalam teori *all male environment*, bahwa mereka yang hidup dalam satu tatanan sosial yang intensif bagi sesama jenis akan menjadi seorang homoseksual. Walaupun secara nilai/norma telah diatur bahwa hubungan seksual hanyalah dilakukan kepada lawan jenis, akan tetapi dengan sarana kehidupan yang demikian dimana hasrat seksualnya tidak tersalurkan pada lawan jenis akan menyalurkannya kepada rekan-rekannya yang sejenis (Hawari 2009).

Penyebutan istilah-istilah homoseksualitas di berbagai tempat bisa saja berbeda, di Madura dikenal dengan *laq-dalaq*, di pesantren-pesantren Jawa dikenal *mairil*, dan di Ponorogo dikenal dengan *warok* dan *gemblok*. Hal tersebut sebagai bukti mudah bahwa orientasi homoseksual merupakan konstruksi sosial yang bisa diterima oleh masyarakat setempat bahkan sarat dengan nilai. Menurut Fajrul Fikri dan Wardana, bahwa identitas seksual seseorang dibentuk oleh proses yang didapatkan dari proses belajar atas apa yang dialami individu terhadap pengaruh lingkungannya (*social cultural*), dan terkait erat dengan internalisasi dan eksternalisasi nilai diri terhadap lingkungan (Fikri dan Wardana 2020).

Oleh sebab itu, bagi kalangan santri di pesantren Madura menganggap dan mengkonstruksi homoseksual sebagai amoral, penyakit, dan berdosa, akan tetapi tidak terhadap perilaku *laq-dalaq* yang menganggapnya tidak termasuk perilaku homoseksual, sehingga penilaian subjektif massa memperbolehkan hal tersebut (Dzulkarnain 2009). Hal

tersebut menunjukkan bahwa perilaku homoseksual di pesantren adalah realitas yang telah mengalami negosiasi identitas. Pasalnya, ketika santri ketahuan melakukan *laq-dalaq*, oleh santri lain hanya dijadikan ejekan namun tidak sampai menimbulkan kebencian.

Terkadang pelaku homoseksual berupaya menyembunyikan identitasnya bila di lingkungan tersebut masih belum menerima realitas homoseksual, namun di pesantren keberadaan ‘homoseksual’ (*laq-dalaq*) sudah mencapai tahap ‘penerimaan’. Menurut Mastuti, dkk, bahwa pada tahap tersebut seorang pelaku homoseksual tidak memikirkan lagi strectipe negatif tentang dirinya, malah mereka terbuka terhadap identitas diri (Mastuti, Winarno, dan Hastuti 2012). Adapun penyebab mereka tetap eksis dengan berbuat homoseksual, diantaranya ialah ingin merasakan fantasi bersenggama, trauma pengalaman, tidak adanya keseimbangan hidup (Jalil 2016).

Keberadaan entitas homoseksual di pesantren terus dilanggengkan oleh ‘produksi’ korban-korban baru yang pada akhirnya, dari trauma selama menjadi ‘korban’ *laq-dalaq*, menyebabkan mereka menjadi pelaku. Sebab anak yang mengalami pelecehan seksual menyebabkan dampak buruk, diantaranya ketidak puasan seksual, disfungsi, dan ketidakcocokan seksual (Azhari, Susanti, dan Wardani 2019). Bahkan, terbiasa bergaul dengan pelaku homoseksual akan mendorong orang lain untuk menjadi seorang homoseksual. Sehingga dalam konteks pesantren, seharusnya para santri yang terindikasi homoseksual, semestinya tidak dibiarkan secara bebas dan masif beradik-kakakan dengan santri anak-anak/ remaja.

Begitu pula dengan keberadaan biseksual. Tidak berbeda jauh dengan penyebab homoseksualitas, keberadaan entitas biseksual juga dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya pengalaman masa lalu yang buruk, korban pelecehan seksual, korban sodomi, dan pengaruh lingkungan yang membuat mereka ingin merasakan fantasi seksual yang lebih (Hamirul 2019). Termasuk persoalan segregasi gender yang ketat yang menyebabkan mereka untuk mencari fantasi kepuasan seksual dengan sesama jenis, meski dia sendiri masih menyukai lawan jenisnya.

Analisis Kebijakan Segregasi Gender di Pesantren

Pengasramaan atau pemondokan sudah merupakan karakteristik tersendiri bagi pesantren. Menurut Dhofier, ada lima elemen dasar yang menjadi ciri khas pesantren yakni pemondokan, masjid, santri, pengjian kitab kuning, dan sosok kiai (Dhofier 1985). Fungsi asrama tersebut bukan hanya sebagai tempat tinggal santri, namun juga sebagai tempat *training* atau pelatihan bagi santri agar hidup mandiri (Sudrajat Nur, Priyatna, dan Zakaria 2016). Pada perkembangan selanjutnya, dengan dibukanya penerimaan santri putri, maka diberlakukan segregasi gender di pesantren dengan aturan yang ketat (Sudrajat Nur, Priyatna, dan Zakaria 2016). Dengan berlandaskan pada ajaran Islam agar tidak mencapur-adukkan laki-laki dan perempuan, oleh karenanya, pemberlakuan segregasi gender di pesantren sudah menjadi bagian yang wajib untuk diterapkan.

Namun, kebijakan tersebut nampaknya perlu ditinjau dan diperhitungkan ulang. Sebab penerapan segregasi yang ketat dapat memunculkan berbagai persoalan, diantaranya berkaitan dengan orientasi seksual santri yang menjadi homoseksual dan biseksual. Lingkungan segregasi yang ketat hanya akan menghasilkan interaksi sosial yang eksklusif dan intensif dengan sesama jenisnya, sehingga mendorong mereka untuk meluapkan perasaannya pada sesama jenis, atau bahkan mereka akan menjadi biseksual untuk mendapatkan kepuasan fantasi seksual yang ‘menyimpang’.

Memperhatikan hal tersebut, maka sejatinya pembuat kebijakan pesantren harus mempertimbangkan aspek orientasi seksual santri untuk membuat kebijakan segregasi yang lebih berkeadilan; tanpa harus menghilangkan ciri khas segergasi yang sudah menjadi ciri khas kepesantrenan. Diantara kebijakan tersebut yakni: a) penerapan kebijakan yang responsif gender, b) menata ulang pengkelasan dan pengasramaan.

Pertama, kebijakan yang responsif gender. Membuat kebijakan responsif gender untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan kemanfaatan yang berkeadilan antara laki-laki dan perempuan. Perencanaan dan penerapan responsif gender bukanlah proses yang terpisah dari sistem yang telah ada, hanya saja memberikan pengintegrasian gender dalam berbagai kegiatan dan kebijakan yang telah tersistem (Nurhamdah 2016).

Dalam sebuah institusi atau lembaga perlu melakukan pemberdayaan nilai dan keorganisasian. Misalnya menetapkan tujuan yang mencerminkan kepedulian terhadap partisipasi laki-laki dan perempuan, melakukan strukturisasi yang melibatkan kedua pihak gender sebagai *equal partner*, dan mendorong tokoh-tokoh perempuan untuk menjadi *role model* dalam mengembangkan nilai-nilai kesetaraan (Yunarti 2017).

Kesetaraan gender yang dimaksud yakni meliputi jaminan bahwa terciptanya keadilan secara keorganisasian dan partisipasi laki-laki dan perempuan serta jaminan tidak adanya diskriminasi atas keduanya. Demikian pula dalam restorasi pendidikan yang berkeadilan gender yang memastikan tidak adanya generalisasi peran, marginalisasi, subordinasi, beban ganda; baik kepada laki-laki ataupun perempuan (Achmad 2019).

Penerapan kebijakan responsif gender di pesantren dapat dilakukan dengan upaya-upaya berikut: 1) melibatkan tokoh atau ustazdah atau nyai untuk bisa mengajar di kelas santri putra, begitu pula sebaliknya, ustazd diberi kesempatan untuk mengajar di kelas santri putri. 2) melibatkan santri laki-laki dan perempuan dalam strukturalisasi keorganisasian sehingga mereka bisa ikut partisipasi dan memberikan aspirasi. 3) memberikan wawasan dan penanaman nilai-nilai kesetaraan gender dalam bidang keilmuan yang dikaji di pesantren. Dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut, di samping untuk menawarkan kebijakan yang responsif gender, juga untuk menciptakan interaksi laki-laki dan perempuan yang lebih dinamis, tidak kaku.

Kedua, penataan ulang pengkelasan dan pengasramaan. Terkait dengan pengkelasan, semestinya untuk menciptakan interaksi gender yang lebih responsif maka pesantren dapat menerapkan model *mix-education* dalam kelas-kelas belajar santri. Artinya, dalam pelajaran-pelajaran tertentu, atau dalam hari-hari tertentu, pesantren bisa menyatukan pembelajaran antara santri putri dan putra dalam kelas yang sama, tentunya dengan penjagaan ustazd dan ustazdah. Hal ini dinilai lebih moderat (untuk pesantren) daripada model *co-education* yang menyatukan siswa putra dan putrinya secara penuh (Rohmah 2017). Dengan model pengkelasan *mix-education* setidaknya mampu menciptakan pembelajaran yang kolaboratif antara peran santri putra dan putri (Damayanti dan Rismaningtyas 2021).

Sementara itu, terkait dengan sistem pengasramaan, untuk menghindari semakin maraknya perilaku homoseksual di kalangan santri, hendaknya pesantren melakukan: 1) pemisahan antara asrama khusus untuk anak-anak dan remaja awal, dengan asrama khusus untuk remaja akhir dan dewasa. Hal ini untuk menghindari terjadinya banyak korban pelecehan seksual pada anak yang akan membuat mereka trauma dan menjadi pelaku pelecehan seksual untuk masa selanjutnya. 2) memberikan hukuman tegas terhadap perilaku homoseksual, tidak ada upaya toleransi terhadap pelanggaran seksual. Peran ustazd dalam hal ini sangat penting untuk mengawasi, membimbangi, dan menegakkan aturan. 3) pesantren hendaknya menyediakan fasilitas tempat mandi dan kamar tidur yang mumpuni.

D. KESIMPULAN

Penerapan segregasi gender yang ketat dalam pengasramaan santri seperti yang terdapat di Pesantren Fathul 'Ilmi, penerapan segregasi gender yang sangat ketat membuat interaksi santri hanya intensif dengan sesama jenisnya, dan terlihat kaku ketika berinteraksi dengan santri lawan jenisnya. Sebab di pesantren bukan hanya mensegregasi dalam

pemondokan saja dan dalam segala hal kegiatan, termasuk interaksi sosial dan pembelajaran.

Dari pemberlakuan segregasi yang ketat tersebut berdampak pada perkembangan orientasi seksual santri yang beragam yakni heteroseksual, homoseksual, bahkan biseksual. Bila hal ini diabaikan dan terus ditutupi, maka pesantren telah menghancurkan derajat 'kesakralan'nya sendiri. Bila tidak ditangani dengan tepat dan segera, pesantren yang seharusnya menjadi lembaga pendidikan keislaman ternyata menjadi sarang perilaku-perilaku seksual 'menyimpang'. Oleh sebab itu, hendaknya pesantren membuka diri dan merestorasi kebijakannya dengan mempertimbangkan banyak hal. Untuk mengatasi persolan tersebut, setidaknya pesantren harus membuat kebijakan yang responsif gender serta menata ulang pengkelasan dan pengasramaan yang lebih berkeadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syaefudin. 2019. "Membangun Pendidikan Berwawasan Gender." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 14 (1): 70-91. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2843>.
- Ayub, Ayub. 2017. "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)." *Tasfiyah* 1 (2): 179. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v1i2.1851>.
- Azhari, Nanang Khosim, Herni Susanti, dan Ice Yulia Wardani. 2019. "Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 7 (1): 1. <https://doi.org/10.26714/jkj.7.1.2019.1-6>.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam, Tradisi, dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bajuri, Ibrahim al-. 1999. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Syarah Ibnu Qasim al-Ghazi*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Damayanti, Dini, dan Fitria Rismaningtyas. 2021. "Pendidikan Berbasis Responsif Gender Sebagai Upaya Meruntuhkan Segregasi Gender." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (Januari). <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47639>.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Dzulkarnain, Iskandar. 2006. "Perilaku Homoseksual di Pesantren." Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- . 2009. "Implikasi Globalisasi Seksualitas Terhadap Kebudayaan Lokal Madura: Studi tentang Perilaku Homoseksual di Pesantren." *Dimensi 1* (1).
- . 2012. *Dekonstruksi Sosial Budaya Alaq Dalaq di Madura*. Yogyakarta: Pararaton.
- Fikri, Mohammad Fajrul, dan Amika Wardana. 2020. "Mairil dan Perkembangan Orientasi Seksual Alumni Santri Pondok Pesantren." *DIMENSI: Jurnal Kajian Sosiologi* 8 (1): 37-46. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v8i1.35567>.
- Goble, Frank G. 1971. *Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik*. Terjemah Supratiknya. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamirul. 2019. "Kaum Biseksual dan Problematikanya di Indonesia." *Sipatahoenan* 5 (1). <https://doi.org/10.2121/sip.v5i1.1265.g1095>.
- Hawari, Dadang. 2009. *Pendekatan Psikoreligi Pada Homoseksual*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.

- Jalil, Abdul. 2016. "Fenomena Lesbian Yogyakarta: Sebuah Fakta Sosial." *Kawistara* 6 (3). <https://doi.org/10.22146/kawistara.22952>.
- Mastuti, Ratri Endah, Rachmad Djati Winarno, dan Lita Widyo Hastuti. 2012. "Pembentukan Identitas Orientasi Seksual pada Remaja Gay." *Prediksi: Kajian Ilmiah Psikologi* 1 (2). <http://103.243.177.137/index.php/prediksi/article/view/271>.
- Muafiah, Evi. 2018. "Realitas Segregasi Gender di Pesantren." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2, . <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries.2.206>.
- Nurhamdah. 2016. "Analisis Kebijakan dan Program Kegiatan di PTAI Responsif Gender." *Jurnal Al-Maiyyah* 7 (2).
- Rivai, Muhammad. 2018. "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Homoseksual pada Laki-Laki." *Al-Asalmiya Nursing* 7 (2).
- Rohmah, Nihayatur. 2017. "Segregasi Gender dalam Pembelajaran Ilmu Falak di Pesantren Salafiyah Lirboyo Kediri dan Pesantren Modern Assalam Surakarta sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11 (1).
- Solichin, Mohammad Muchlis. 2013. *Keberlangsungan dan Perubahan Pendidikan Pesantren di Tengah Arus Modernisasi Pendidikan*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Sudrajat Nur, Gian Nova, Aquarini Priyatna, dan Mumuh Muhsin Zakaria. 2016. "Homososialitas di Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Sakan." *HUMANIKA* 23 (2): 9. <https://doi.org/10.14710/humanika.v23i2.13641>.
- Thoriquttyas, Titis. 2018. "Segregasi Gender dalam Manajemen Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2 (2): 287-314. <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.287-314>.
- Yunarti, Sri. 2017. "Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7 (2): 221. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.178>.